

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara ontologis, hakikat pendidikan melampaui sekadar proses transfer pengetahuan; ia merupakan prasyarat mutlak bagi eksistensi dan keberadaban seorang manusia. Kesadaran filosofis inilah yang kemudian dikristalisasi oleh negara ke dalam bentuk mandat konstitusional, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai wujud afirmasi tanggung jawab tersebut, negara mengikatkan diri pada kewajiban imperatif untuk menyelenggarakan pendidikan dasar yang membebaskan masyarakat dari tirani biaya, yang dimanifestasikan melalui dedikasi alokasi fiskal minimal 20% dari postur APBN dan APBD. Kelahiran instrumen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun 2005 merupakan episentrum dari kebijakan intervensi negara tersebut, yang didesain untuk mendobrak eksklusivitas akses sekaligus menjadi katalisator pemerataan mutu di seluruh lanskap satuan pendidikan, tak terkecuali pada entitas madrasah.

Dalam tataran ideal (normatif), rasionalitas di balik kucuran dana BOS adalah untuk mengampulasi beban ekonomi yang membelenggu masyarakat marginal, memperlebar spektrum aksesibilitas, dan menyuntikkan daya hidup bagi peningkatan kualitas dialektika pembelajaran di ruang kelas. Ekspektasi ini berdiri di atas pilar tata kelola yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas paripurna. Visi ini beresonansi secara harmonis dengan cetak biru peradaban global, yakni Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada pilar keempat yang mendambakan pendidikan berkualitas yang inklusif, adil, dan merata.

Kendati demikian, realitas empiris di lapangan sering kali memperlihatkan anomali yang kontras dengan postulat normatif tersebut. Implementasi kebijakan BOS di Indonesia masih terjebak dalam labirin problematika struktural maupun kultural. Entropi (kekacauan) manajerial ini

termanifestasi dalam wujud keterbatasan volume rasio anggaran yang tidak seimbang dengan eskalasi kebutuhan, birokrasi penyaluran yang kerap mengalami stagnasi, kerapuhan fondasi tata kelola (governance), hingga defisitnya kapasitas intelektual dan teknis para manajer pendidikan di tingkat satuan madrasah.

Jika dibedah menggunakan pisau analisis teori manajemen pendidikan, pembiayaan bukanlah sekadar entitas administratif berupa tumpukan kuitansi, melainkan urat nadi strategis yang menghidupkan seluruh anatomi organisasi. Sirkulasi pembiayaan ini menuntut orkestrasi yang ketat pada fase konseptualisasi (perencanaan), aktualitas (pelaksanaan), hingga kalibrasi (pengawasan). Praksis pengelolaan kapital pendidikan yang berdaya guna harus senantiasa tunduk pada dogma good governance. Oleh karena itu, ekuilibrium keberhasilan sebuah madrasah tidak hanya didikte oleh seberapa masif injeksi dana yang diterima, melainkan sangat bergantung pada kepiawaian rasionalitas manajerial dalam mengonversi sumber daya yang terbatas tersebut menjadi instrumen pendongkrak mutu pedagogis.

Tinjauan terhadap konstelasi penelitian terdahulu menyingkap sebuah paradoks yang menarik. Secara kuantitatif, intervensi dana BOS memang terbukti ampuh dalam memperluas demografi partisipasi sekolah dan menekan angka putus sekolah secara eksponensial. Namun, secara kualitatif, daya ungkit dana BOS terhadap eskalasi mutu pembelajaran—khususnya pada entitas Madrasah Ibtidaiyah—masih berada pada titik stagnan. Penyakit kronis yang menggerogoti efektivitas ini berakar pada ketimpangan antara pagu dana dengan ongkos operasional riil, disorientasi alokasi pembelanjaan, buramnya cermin transparansi pelaporan, serta kelumpuhan fungsi pengawasan baik dari organ internal maupun otoritas eksternal. Fenomena ini mengafirmasi terjadinya jurang pemisah (gap) yang sangat curam antara teks kebijakan dan praksis di lapangan.

Realitas diskrepansi tersebut tervalidasi melalui pemotretan awal (studi pendahuluan) yang dilakukan peneliti pada dua entitas: Madrasah Ibtidaiyah (MI) Iqro Leles di wilayah Kabupaten Garut dan Madrasah Ibtidaiyah (MI)

Asshulaha Cieurih di lanskap Kota Tasikmalaya. Di kedua laboratorium sosial ini, ditemukan residu problematika klasik yang mereplikasi anomali nasional. Madrasah dihadapkan pada dilema keterlambatan likuiditas, defisit anggaran dalam mengejar pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP), serta kelangkaan presisi dalam hal perumusan arsitektur keuangan dan pelaporannya. Terdapat sebuah ironi manajerial: di satu sisi, kedua institusi ini memiliki modal sosial yang luar biasa berupa tingginya partisipasi filantropis masyarakat dan komitmen kepala madrasah; namun di sisi lain, tata kelola dana BOS yang ada belum bertransformasi menjadi mesin pendorong yang optimal bagi keunggulan mutu pembelajaran.

Penetapan MI Iqro Leles dan MI Asshulaha Cieurih sebagai lokus investigasi bukan dilandasi oleh kebetulan geografis, melainkan didasarkan pada pertimbangan epistemologis yang kuat. Keduanya merepresentasikan entitas madrasah dasar Islam swasta yang menampung demografi peserta didik dalam skala masif, namun beroperasi pada dua kutub karakteristik sosiologis yang kontras (transisi semi-pedesaan vis-a-vis sentitas perkotaan). Perpaduan antara kuatnya komitmen kultural di satu sisi, dengan rapuhnya kepatuhan pada prinsip good governance di sisi lain, menjadikan kedua madrasah ini sebagai kawah candradimuka yang sangat kaya untuk membedah kesenjangan antara teks kebijakan dan realitas operasional.

Berpijak pada kegelisahan akademik dan urgensi empiris tersebut, penelitian ini memposisikan diri sebagai ikhtiar intelektual untuk membongkar, menganalisis, dan merekonstruksi anatomi manajemen dana BOS di lingkungan madrasah tingkat dasar. Lensa observasi diarahkan secara tajam untuk membedah dialektika perencanaan, dinamika eksekusi, serta ketegasan pengawasan finansial sebagai variabel independen yang memengaruhi eskalasi kualitas pembelajaran.

Sebagai muara dari seluruh diskursus tersebut, peneliti merumuskan eksplorasi ini ke dalam tajuk penelitian: "Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Madrasah".

Melalui investigasi yang mendalam, disertasi ini diproyeksikan untuk melahirkan sebuah konstruksi model manajemen dana BOS yang tak hanya akuntabel dan partisipatif, tetapi juga memiliki orientasi teleologis yang tajam terhadap mutu. Konklusi dari penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan kebaruan teoretis (theoretical novelty) bagi khazanah ilmu manajemen pembiayaan pendidikan Islam, sekaligus menawarkan rekomendasi praksis yang bumi bagi para pemangku kebijakan dalam menata ulang arsitektur pengelolaan dana BOS di masa depan.

B. Perumusan Dan Pembatasan Masalah

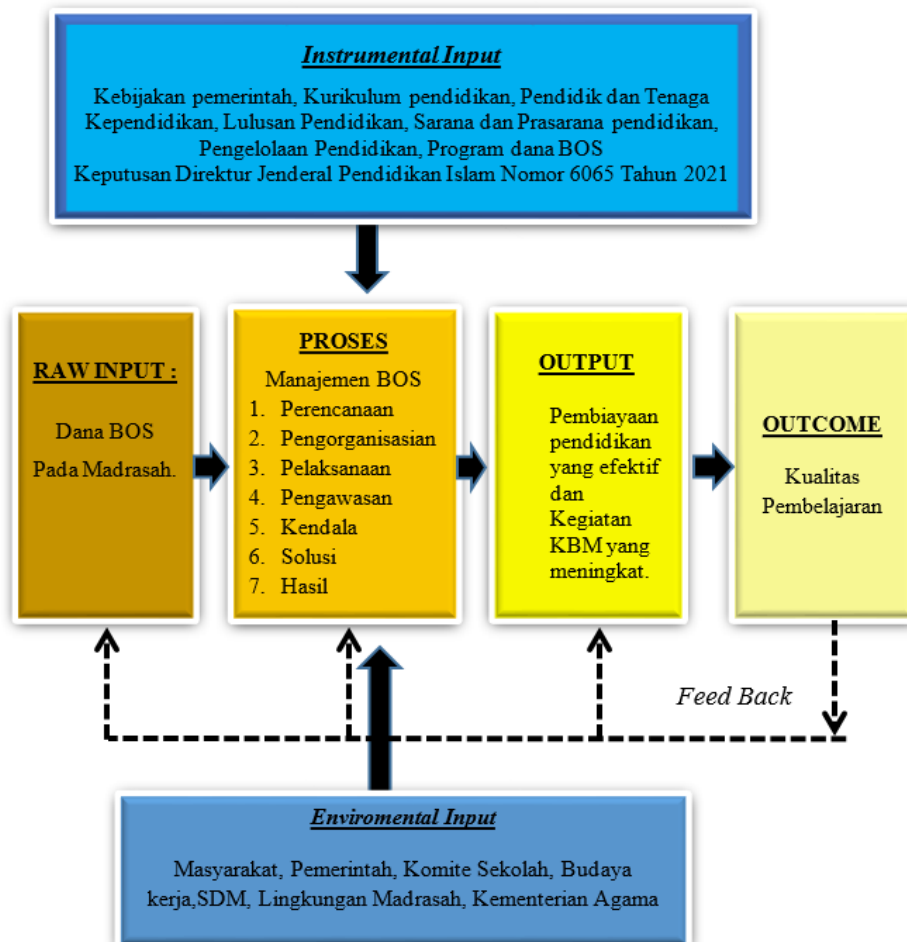
1. Perumusan Masalah

Program BOS secara normatif dirancang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran madrasah melalui tata kelola yang akuntabel. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan ideal dengan realitas empiris, di mana madrasah masih menghadapi kendala manajerial, inefisiensi anggaran, dan keterbatasan struktural. Berangkat dari ketidakselarasan antara tuntutan kebijakan dan kondisi faktual tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana proses perencanaan penganggaran dana BOS dilakukan oleh madrasah dalam menetapkan prioritas kebutuhan pembelajaran yang partisipatif dan transparan ?
- b. Bagaimana pengorganisasian dana BOS dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran yang berkaitan dengan struktur dan mekanisme kerja dalam pelaksanaan program BOS ?
- c. Bagaimana pelaksanaan penggunaan dana BOS direalisasikan untuk mendukung pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, serta sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip akuntabilitas dan petunjuk teknis yang berlaku ?

- d. Bagaimana mekanisme pengawasan dan pelaporan pertanggungjawaban dana BOS dijalankan untuk menjamin tata kelola yang baik (*good governance*) dan meminimalisir penyimpangan ?
- e. Apa kendala dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran seperti keterlambatan penyaluran dana dari pemerintah pusat ke rekening Madrasah, keterbatasan jumlah dana dibandingkan dengan kebutuhan operasional yang sebenarnya, kurangnya pemahaman teknis pengelola terhadap regulasi BOS dan penyusunan laporan keuangan, keterbatasan sarana administrasi digital ?
- f. Apa solusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mengatasi kendala dalam pengelolaan dana BOS seperti keterlambatan penyaluran dana dari pemerintah pusat ke rekening Madrasah, keterbatasan jumlah dana dibandingkan dengan kebutuhan operasional yang sebenarnya, kurangnya pemahaman teknis pengelola terhadap regulasi BOS dan penyusunan laporan keuangan, keterbatasan sarana administrasi digital?
- g. Bagaimana hasil pengelolaan dana BOS dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dari aspek terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran dasar, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik non ASN, kelancaran kegiatan belajar mengajar (KBM), partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan madrasah, perbaikan dalam efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik di satuan pendidikan Islam?

Perumusan masalah manajemen dana BOS untuk meningkatkan kualitas pembelajaran madrasah menunjukkan keterkaitan antara berbagai komponen dalam proses manajemen dana BOS dengan kualitas pembelajaran di Madrasah. Hubungan antarkomponen tersebut dapat dijelaskan melalui gambar di bawah ini :



Gambar 1.1 Bagan Perumusan Masalah Penelitian.

Berdasarkan gambar perumusan masalah dapat dijelaskan bahwa komponen input dalam manajemen dana BOS dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran madrasah terdiri atas:

- 1) *Instrumental Input* yang meliputi kebijakan, regulasi, dan sumber dana BOS, serta pedoman teknis pengelolaan, mekanisme pelaporan, dan prinsip *good governance* (transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas).
- 2) *Raw Input* yaitu sumber dana bantuan operasional sekolah (BOS) madrasah.

- 3) *Environmental Input* yang meliputi faktor eksternal seperti dukungan masyarakat, pengawasan Kementerian Agama, kebijakan daerah, kondisi ekonomi, dan sosial-budaya sekitar madrasah.
- 4) Komponen proses merupakan mobilisasi semua komponen secara sistematis sehingga menghasilkan *output* dan *outcome* yang diharapkan. Adapun komponen proses pada gambar di atas yaitu proses manajerial yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan dana BOS pada setiap tahap.
- 5) Komponen *Output* merupakan keluaran yang diharapkan dari proses yaitu efektivitas pembiayaan, terpenuhinya kebutuhan operasional pembelajaran, serta tersedianya sarana dan sumber belajar yang memadai sehingga kegiatan belajar mengajar (KBM) meningkat.
- 6) Komponen *Outcome* dari hasil penelitian ini adalah kualitas pembelajaran yang meningkat.
- 7) Komponen *feedback* merupakan umpan balik yang mencakup hasil evaluasi, pengawasan internal dan eksternal, serta masukan masyarakat yang digunakan untuk memperbaiki kebijakan dan praktik pengelolaan BOS pada periode berikutnya.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang luas, sehingga diperlukan pembatasan masalah agar analisis lebih fokus dan mendalam. Pembatasan penelitian diarahkan pada fungsi manajemen pendidikan, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dana BOS, serta faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi kualitas pembelajaran madrasah.

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Perencanaan dana BOS meliputi 1) penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) 2) kesesuaian perencanaan dengan Petunjuk Teknis (Juknis) BOS yang ditetapkan Kementerian Agama, 3) keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholders*) 4) relevansi antara

rencana penggunaan dana dan Standar Nasional Pendidikan (SNP), terutama pada standar proses, sarana-prasarana, dan pendidik.

- b. Pengorganisasian dana BOS berkaitan dengan struktur dan mekanisme kerja dalam pelaksanaan program BOS meliputi 1)pembentukan Tim Manajemen BOS Madrasah yang terdiri atas Kepala Madrasah, bendahara, dan anggota tim lain sesuai dengan ketentuan, 2)pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan antaranggota tim secara jelas dan tertulis, 3)ketersediaan sistem administrasi dan dokumentasi keuangan yang tertib dan terdokumentasi, 4)kompetensi dan kapasitas manajerial sumber daya manusia dalam melaksanakan fungsi pengelolaan dana BOS, 5)hubungan koordinatif antara tim BOS madrasah dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai pengawas teknis.
- c. Pelaksanaan dana BOS merupakan implementasi dari rencana yang telah disusun meliputi 1)ketepatan waktu pencairan dan penggunaan dana sesuai jadwal alokasi, 2)kesesuaian realisasi kegiatan dengan RKAM dan juknis BOS, 3)penggunaan dana untuk komponen yang diperbolehkan, seperti pembayaran honor, kegiatan pembelajaran, pengadaan sarana belajar, dan kegiatan penunjang, 4)penerapan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penggunaan dana, 5)pelibatan komite madrasah dan guru dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh BOS.
- d. Pengawasan dana BOS merupakan fungsi manajemen yang berperan memastikan penggunaan dana BOS sesuai dengan ketentuan dan tujuan meliputi 1)mekanisme pengawasan internal oleh kepala madrasah dan tim BOS, 2)pengawasan eksternal oleh Kementerian Agama, inspektorat daerah, atau lembaga audit lainnya, 3)frekuensi dan kualitas pelaporan penggunaan dana (LPJ), 4)transparansi informasi keuangan kepada publik (orang tua, masyarakat, dan pemangku kepentingan), 5)tindak lanjut hasil audit atau temuan dalam pelaporan.

- e. Kendala dalam pengelolaan dana BOS dalam implementasinya, berbagai kendala kerap muncul yang menghambat efektivitas program BOS. Indikator kendala yang diteliti antara lain 1) keterlambatan penyaluran dana dari pemerintah pusat ke rekening madrasah, 2) keterbatasan jumlah dana dibandingkan dengan kebutuhan operasional yang sebenarnya, 3) kurangnya pemahaman teknis pengelola terhadap regulasi BOS dan penyusunan laporan keuangan, keterbatasan sarana administrasi digital (seperti aplikasi eRKAM) di lingkungan madrasah swasta, 4) faktor budaya organisasi, seperti resistensi terhadap perubahan dan kurangnya disiplin administrasi.
- f. Solusi untuk mengatasi kendala dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran meliputi 1) peningkatan kapasitas manajerial melalui pelatihan dan pendampingan teknis bagi pengelola BOS, 2) optimalisasi perencanaan berbasis kebutuhan (*needs-based planning*), penguatan sistem monitoring dan evaluasi internal di madrasah, 3) digitalisasi pelaporan dan pelacakan dana BOS untuk meningkatkan transparansi, 4) penguatan peran komite madrasah dan masyarakat dalam pengawasan partisipatif, koordinasi intensif antara madrasah dan pihak Kementerian Agama daerah untuk mengatasi keterlambatan pencairan dan penyelarasan kebijakan.
- g. Hasil pengelolaan dana BOS yang akan dianalisis dalam penelitian ini meliputi 1) terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran dasar, 2) peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik non-ASN melalui pembayaran honor rutin, kelancaran kegiatan belajar mengajar (KBM) tanpa hambatan keuangan signifikan, 3) meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan madrasah, 4) perbaikan dalam efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik di satuan pendidikan Islam.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

1.1 Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Madrasah untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran pada Madrasah Ibtidaiyah Iqro Kecamatan Leles Kabupaten Garut dan Madrasah Ibtidaiyah Asshulaha Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya.

1.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini memiliki tujuan khusus untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang :

- a. Perencanaan dana BOS untuk meningkatkan kualitas pembelajaran madrasah di MI Iqro Kabupaten Garut dan MI Assulaha Kota Tasikmalaya.
- b. Pengorganisasian dana BOS untuk meningkatkan kualitas pembelajaran madrasah di MI Iqro Kabupaten Garut dan MI Assulaha Kota Tasikmalaya.
- c. Pelaksanaan dana BOS untuk meningkatkan kualitas pembelajaran madrasah di MI Iqro Kabupaten Garut dan MI Assulaha Kota Tasikmalaya.
- d. Pengawasan dana BOS untuk meningkatkan kualitas pembelajaran madrasah di MI Iqro Kabupaten Garut dan MI Assulaha Kota Tasikmalaya.
- e. Kendala dalam Pengelolaan dana BOS untuk meningkatkan kualitas pembelajaran madrasah di MI Iqro Kabupaten Garut dan MI Assulaha Kota Tasikmalaya.
- f. Solusi mengatasi kendala untuk meningkatkan kualitas pembelajaran madrasah di MI Iqro Kabupaten Garut dan MI Assulaha Kota Tasikmalaya.

- g. Hasil pengelolaan dana BOS untuk meningkatkan kualitas pembelajaran madrasah di MI Iqro Kabupaten Garut dan MI Assulaha Kota Tasikmalaya.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat teoritis dan praktis.

2.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan tentang manajemen dan implementasi kebijakan dana BOS pada madrasah dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas pembelajaran, serta menjadi referensi bagi pembaca, mahasiswa, dan peneliti selanjutnya.

2.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai stakeholders, sebagai berikut :

1) Bagi Madrasah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi internal untuk memperbaiki sistem manajemen dana BOS agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel dan dapat mendorong madrasah untuk menerapkan perencanaan berbasis kebutuhan (*needs-based planning*) dalam penyusunan RKAM sehingga dapat dijadikan pedoman untuk menyusun strategi peningkatan kualitas pembelajaran melalui pengelolaan dana yang efektif.

2) Bagi Kepala Madrasah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengambilan keputusan manajerial yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan dan peningkatan mutu pembelajaran serta dapat meningkatkan kompetensi kepemimpinan dan tanggung jawab profesional dalam pengelolaan dana publik.

3) Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang keterkaitan antara pengelolaan keuangan dan mutu pembelajaran, sehingga guru dapat ikut berperan aktif dalam perencanaan dan evaluasi penggunaan dana BOS sehingga mendorong partisipasi guru dalam menciptakan pembelajaran yang lebih inovatif dengan dukungan pendanaan yang tepat sasaran.

4) Bagi Pemerintah (Kementerian Agama)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan BOS di madrasah, baik dari segi mekanisme penyaluran, akuntabilitas, maupun efektivitasnya terhadap peningkatan mutu pendidikan dasar Islam dan juga dapat menyediakan dasar empiris untuk penyempurnaan regulasi dan juknis BOS agar lebih adaptif terhadap kebutuhan madrasah swasta maupun negeri sehingga program pemerintah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas, inklusif, dan berkeadilan, sesuai dengan amanat UUD 1945 dan SDGs poin ke-4 dapat terwujud.

5) Bagi Masyarakat dan Komite Madrasah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam pengawasan dana pendidikan sehingga mendorong tumbuhnya budaya akuntabilitas sosial dalam pengelolaan dana publik di sektor pendidikan Islam.

6) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi ilmiah bagi peneliti lain yang tertarik mengembangkan studi tentang manajemen pembiayaan pendidikan Islam dan memberikan contoh penerapan pendekatan sistem dalam penelitian manajemen pendidikan, yang dapat

direplikasi untuk kajian di tingkat madrasah, pesantren, maupun sekolah umum.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana perencanaan dana BOS untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Iqro Leles Kabupaten Garut dan Madrasah Ibtidaiyah Asshulaha Cieurih Kota Tasikmalaya ?
- b. Bagaimana pengorganisasian dana BOS untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Iqro Leles Kabupaten Garut dan Madrasah Ibtidaiyah Asshulaha Cieurih Kota Tasikmalaya?
- c. Bagaimana pelaksanaan dana BOS untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Iqro Leles Kabupaten Garut dan Madrasah Ibtidaiyah Asshulaha Cieurih Kota Tasikmalaya?
- d. Bagaimana pengawasan dana BOS untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Iqro Leles Kabupaten Garut dan Madrasah Ibtidaiyah Asshulaha Cieurih Kota Tasikmalaya?
- e. Apa kendala dana BOS untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Iqro Leles Kabupaten Garut dan Madrasah Ibtidaiyah Asshulaha Cieurih Kota Tasikmalaya?
- f. Apa solusi untuk mengatasi kendala dana BOS untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Iqro Leles Kabupaten Garut dan Madrasah Ibtidaiyah Asshulaha Cieurih Kota Tasikmalaya?
- g. Bagaimana hasil pengelolaan dana BOS untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Iqro Leles Kabupaten Garut dan Madrasah Ibtidaiyah Asshulaha Cieurih Kota Tasikmalaya?